

WACANA IDENTITAS NASIONAL PADA BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH DI INGGRIS DAN INDONESIA: KAJIAN KOMPARATIF

Hieronymus Purwanta, Heribertus Hery Santosa dan Anton Haryono

Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma,
dan Fakultas KIP, Universitas Sanata Dharma
Email: purwantah@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan terpenting pendidikan sejarah adalah untuk menumbuhkan identitas dalam diri generasi muda. Artikel ini bermaksud untuk meneliti bagaimana bangsa Inggris dan Indonesia memproduksi wacana identitas nasional mereka melalui buku teks pelajaran sejarah SMA. Metode yang digunakan adalah *Critical Discourse Analysis (CDA)* terhadap narasi yang terdapat pada buku teks pelajaran sejarah dari kedua negara sebagai subjek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks pelajaran sejarah di Inggris mewacanakan bahwa bangsa Inggris (*British*) merupakan subjek dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi, serta menarasikan pencapaian dan sukses yang diperoleh masyarakat Inggris. Bahkan, untuk menonjolkan wacana itu, pengarang buku teks pelajaran sejarah melakukan heroifikasi dan mitologisasi berbagai tokoh dan peristiwa sejarah. Sebaliknya, buku teks pelajaran sejarah di Indonesia justru mewacanakan masyarakat Indonesia sebagai objek dari kekuatan bangsa asing, khususnya bangsa Belanda dan peradaban Eropa. Dari sudut pandang ini, kebudayaan Indonesia sebagai sumber identitas masyarakat dinegasikan dan digambarkan sebagai “kuno” dan “kolot” yang tidak cocok dengan kebudayaan modern.

Kata kunci: wacana, identitas nasional, buku teks, pelajaran sejarah

NATIONAL IDENTITY DISCOURSE ON THE HIGH SCHOOL HISTORY TEXTBOOK IN UNITED KINGDOM AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY

Abstract

One of the most important goals of history education is to infuse national identity to young generation. Aim of this article is to explore of how British (United Kingdom) and Indonesia product their discourse of national identity through their high school history textbooks. A methods use is *Critical Discourse Analysis (CDA)* where content of history textbooks from the two countries as subject of analysis. Approach used is hermeneutics. Result shows that high school textbooks in United Kingdom discoursing British as subject of historical events, achievement and success of British people. Moreover, authors of the textbooks made heroification and mythologization. In contrast, high school textbooks in Indonesia discoursing Indonesians as object of foreign powers especially Dutch and Western civilization. From this viewpoint, Indonesian cultures as source of identity is negated and described as “old fashion” that couldn't fit modern culture.

Keywords: discourse, national identity, textbook, history education

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pendidikan sejarah adalah untuk membentuk atau membangun kesadaran identitas sosio-kultural nasional. Secara etimologis, identitas nasional merupakan penggabungan dua kata, yaitu “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang dapat dimaknai sebagai ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Ditinjau dari perspektif asal usul, identitas bermula dari pernyataan diri atau pemberian. Identitas yang merupakan pernyataan diri hanya berlaku pada manusia. Melalui refleksi panjang, akhirnya manusia menyadari siapa dirinya, baik ciri fisik maupun kepribadian. Kesadaran akan identitas tersebut kemudian dinyatakan kepada pihak lain ketika bersosialisasi. Di lain pihak,

identitas yang berasal dari pemberian adalah penamaan yang dilakukan manusia terhadap segala sesuatu yang diketahuinya (Glaserfeld, 1984).

Identitas memiliki fungsi sangat penting, karena memberikan penjelasan yang relatif benar dan tepat. Tanpa identitas, sesuatu akan sulit diidentifikasi dan digali informasi yang jelas, benar dan tepat. Sartono menjelaskan pentingnya identitas dengan menganalogikan pada orang yang kehilangan ingatan:

Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya. Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus. (Kartodirdjo, 2005: 114-115)

Analogi yang dikemukakan Sartono tersebut berlaku tidak hanya pada tataran individual atau perseorangan, tetapi juga pada tataran kolektif, baik keluarga, etnis maupun bangsa. Dari sudut pandang ini, tanpa memiliki identitas, bangsa akan tidak memiliki akar untuk menghidupi aktivitas, vitalitas dan kreativitasnya. (Wiriaatmadja, 1992: 68)

Kata kedua adalah “nasional” yang merujuk pada konsep kebangsaan. Anderson (1991: 6) menempatkan negara kebangsaan sebagai *imagined community* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi komunitas imajiner. Berbeda dengan komunitas yang nyata dimana anggotanya saling kenal dan secara intensif saling berinteraksi, *imagined community* merupakan komunitas yang anggotanya secara garis besar dapat dikatakan tidak saling kenal serta tidak pernah saling bertemu dan berinteraksi secara langsung. Dari sudut pandang inilah maka negara kebangsaan ditempatkan sebagai komunitas yang “tercita dan tercipta” kan.

Penempatan negara kebangsaan sebagai komunitas yang terciptakan, karena keberadaannya dicita-citakan bersama oleh komunitas-komunitas di bawahnya. Renan (1996: 51) mengajukan pandangan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi prinsip spiritual negara bangsa. Pertama adalah sejarah yang berisi pengalaman-pengalaman bersama dan menjadi ingatan kolektif, sehingga menumbuhkan solidaritas sebagai pewaris berbagai nilai yang dihidupi sampai sekarang dan pemilik nasib yang sama. Unsur kedua adalah keinginan untuk hidup bersama, kehendak untuk secara bersama mempertahankan dan mengembangkan berbagai warisan masa lampau:

The nation, like the individual, is the outcome of a long and strenuous past of sacrifice and devotion. Of all cults, the cult of ancestors is the most legitimate, since our ancestors have made us what we are. A heroic past of great men, of glory (I mean genuine glory): this is the social capital on which a national idea is established. To have common glories in the past and common will in the present; to have done great things together and to will that we do them again: these are the conditions essential to being a people...(Renan, 1996: 58)

Pada kutipan di atas, Renan secara jelas menyatakan bahwa bangsa, sebagaimana perseorangan, merupakan hasil dari masa lampau yang panjang dan berat dari pengorbanan dan kebaktian. Diantara semua kebudayaan, budaya para leluhur adalah yang paling sah, karena para leluhurlah yang membuat kita seperti sekarang ini. Masa lampau orang-orang besar yang heroik merupakan modal sosial tempat bersemainya gagasan tentang negara bangsa. Memiliki kebesaran masa lampau dan semangat untuk secara bersama membuat keberhasilan besar merupakan hal yang mendasar sebagai rakyat.

Selain sebagai cita-cita bersama, negara kebangsaan juga menjadi citra bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 286) kata citra diartikan sebagai gambaran atau rupa.

Gambaran tersebut bukan dalam arti nyata, tetapi lebih merupakan aktivitas mental. Pada Webster Dictionary penjelasan lebih detail diberikan untuk kata “*image*” sebagai “*a mental conception held in common by members of a group and symbolic of a basic attitude and orientation*” atau “*a popular conception (as of a person, institution, or nation) projected especially through the mass media*”. (<http://www.merriam-webster.com>) Dalam konteks ini, citra merupakan gambaran yang mengendap pada pikiran warga bangsa tentang negara bangsa Indonesia dan dibangun melalui informasi dari media.

Media berperan sangat penting dalam penumbuhkembangan identitas nasional. Anderson (1991: 18) yang mengkaji tentang peran media cetak dalam nasionalisme Eropa, antara lain menjelaskan sebagai berikut:

...the development of print-as-commodity is the key to the generation of wholly new ideas of simultaneity, still, we are simply at the point where communities of the type 'horizontal-secular, transverse-time' become possible. Why, within that type, did the nation become so popular? The factors involved are obviously complex and various. But a strong case can be made for the primacy of capitalism. . (Anderson, 1991: 37)

Dari kutipan tersebut dapat dipahami penjelasan Anderson bahwa perkembangan komoditas cetak merupakan kunci lahirnya generasi yang memiliki gagasan yang sungguh-sungguh baru, yaitu komunitas bertipe “horizontal-sekuler, melintang waktu”¹ menjadi mungkin diwujudkan. Faktor yang menjadikan gagasan tentang negara bangsa sangat populer pada masyarakat tipe tersebut adalah kompleks, tetapi terutama oleh keunggulan kapitalisme.

Tentu saja media cetak bukan merupakan faktor penyebab tunggal lahir dan berkembangnya nasionalisme. Dalam kasus nasionalisme pada wilayah yang sebagian besar rakyatnya tidak media cetak *minded*, komunikasi terjadi dalam berbagai cara, antara lain melalui media cetak, radio, rapat-rapat akbar dan berita dari mulut ke mulut.

Kesadaran sebagai warga bangsa merupakan sumber bagi lahir dan berkembangnya identitas nasional. Oleh karena negara bangsa merupakan *imagined community*, maka identitas nasional pada umumnya bersifat abstrak dan berkembang dari waktu ke waktu. Kartodirdjo (1990: 56) berpedapat bahwa identitas nasional memiliki ciri pokok: historisitas, keunikan dan partikular. Dijelaskan bahwa:

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tidak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subyektivitas menonjol apabila identitas itu ditempatkan dalam hirarkhi identitas humanitas universalitas. (Kartodirdjo dalam Depdikbud, 1990: 56)

Produk cetak tidak hanya penting pada tahap lahirnya nasionalisme, tetapi juga pada pewarisan identitas nasional kepada generasi baru. Salah satu bentuk produk cetak yang berperan penting dalam mewariskan identitas nasional adalah buku teks pelajaran sejarah. Sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan sejarah, yaitu mewariskan identitas nasional, buku teks pelajaran sejarah disusun dengan cermat untuk mewujudkan tujuan pewarisan tersebut.

Banyak ahli berusaha menjelaskan pengertian buku teks, antara lain Warrant (dari Mahmood, 2006: 3) menjelaskan bahwa “*A textbook is printed instructional material in bound form, the contents of which are properly organized and intended for use in elementary or high school curricula*”. Maksudnya, buku teks merupakan bahan instruksional yang bentuknya sudah tersatukan, isinya sudah terorganisasi secara baik dan diarahkan untuk

¹ Masyarakat horisontal-sekuler adalah masyarakat yang menghargai akan kesederajadan antar sesama manusia dan memfokuskan energi untuk mengembangkan peri kehidupan duniawi. Di pihak lain, melintang waktu menunjukkan hubungan atau keterkaitan temporal antara masyarakat masa kini dan masa lalu. Bandingkan dengan Vessey, 2011: 27.

digunakan bagai kurikulum Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Atas.

Ahli lain memahami buku teks dari perspektif fungsinya, yaitu sebagai media pembelajaran (instruksional) yang dominan peranannya di kelas; media penyampaian materi kurikulum; dan bagian sentral dalam suatu sistem pendidikan (Suryaman, 2007: 3). Bahkan buku teks juga dikategorikan sebagai alat bantu siswa memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca. Buku pelajaran juga merupakan alat bantu memahami dunia (di luar dirinya).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa buku pelajaran merupakan buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang pendidikan tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan suatu bidang studi. Buku pelajaran merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasa dilengkapi sarana pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan sebagai penunjang program pembelajaran.

Materi pembelajaran yang terdapat pada buku teks diorganisasi sesuai dengan tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang terdapat dalam kurikulum. Dari sudut pandang ini, buku teks pelajaran sejarah dipandang mampu menanamkan nasionalisme apabila berisi uraian fakta historis dan interpretasi yang menumbuhkan kesadaran diri sebagai warga bangsa dan mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral bagi pembaca. Pada tingkat kurikuler, buku teks pelajaran sejarah dituntut untuk memuat uraian yang membangun karakter atau identitas kultural nasional yang kuat, memberi dorongan untuk menjaga kohesivitas dan progresivitas masyarakat dan mengembangkan kemampuan akademik yang tinggi bagi siswa sebagai pembaca.

Dari kajian tentang fungsi dan peran penting buku teks dalam mencapai tujuan pendidikan sejarah di sekolah, tulisan ini diarahkan untuk mencermati isi buku teks pelajaran sejarah di Inggris dan Indonesia.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Pelajaran Sejarah di Inggris

Secara kurikuler tujuan pelajaran sejarah di Inggris adalah untuk melengkapi siswa agar mampu berpikir kritis, mempertimbangkan bukti, menyaring pernyataan dan argumen, serta mengembangkan perspektif dan penilaian. Selain itu, siswa diarahkan untuk mengetahui masa lampau dan posisi Inggris di dunia internasional untuk memahami tantangan masa kini. Selanjutnya, sasaran kurikulum nasional pelajaran sejarah adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, antara lain mengetahui sertamemahami kisah negeri itu: bagaimana masyarakat Inggris mengembangkan bangsanya dan bagaimana Inggris mempengaruhi dunia. Selain itu siswa juga diarahkan untuk mengetahui serta memahami sejarah Inggris sebagai satu proses yang saling terkait, kisah kronologis dari penghuni pertama kepulauan ini sampai perkembangan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan hari ini. Dari tujuan dan sasaran tersebut, terlihat bahwa nasionalisme Inggris diusahakan untuk diwariskan terutama melalui narasi tentang “bagaimana masyarakat Inggris mengembangkan bangsanya dan bagaimana Inggris mempengaruhi dunia”. Pengutamaan atau dalam istilah van Dijk (Rosidi, 2007) sebagai struktur supra terlihat dari penempatannya sebagai yang pertama dalam Sasaran Kurikulum.

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan oleh pengarang, historiografi pendidikan di Inggris menggunakan pendekatan naratif modern. Salah satu buku teks yang membahas tentang sejarah Inggris dengan menggunakan pendekatan naratif adalah *British Empire* (Levine, 2007). Penggunaan pendekatan naratif modern antara lain dapat dilihat dari uraian

pembukanya untuk bab III yang membahas tentang *Britain in India* sebagai berikut:

In the colonial scheme of things, Britain's imperial interests in India were among its most important as early as the seventeenth century. It would, of course, be the middle of the nineteenth century before the British government laid formal claim to ruling large parts of India, but that did not mean that British India was not central to Britain's Empire at a far earlier date.

India was not a single country or entity, but rather a collection of states ruled in different ways, and frequently with markedly different languages and customs. There was no single Indian language or religion. Small and large areas were governed by local dynasties, and by the eighteenth century much of northern and central India was ruled by the powerful Moguls. British imperial influence in the subcontinent came on the heels of this empire. The last wave of Muslim Moguls had arrived in India from central Asia in the sixteenth century, cleverly forging alliances with powerful Hindu elites in India and rapidly establishing significant control. Mogul power and wealth was considerable and early British traders were obliged to pay homage to the Mogul rulers. In the seventeenth century European merchants typically traded in Asia by permission of local rulers whose power and military might were at least the equal of the Europeans.

The dominating British enterprise in India was the East India Company (EIC), launched in London in 1600 by a powerful financial elite. The EIC was a chartered company, enjoying a monopoly over British trade with the east. The chartered company was an economic and political device of mutual benefit to a company and its backers and to the government of the country in which the company was established. The position of such corporations changed over time, and by the eighteenth century, in return for a share of the profits (and sometimes also favourable loans), the government granted the companies tremendous political and military as well as economic freedom in a given area. The EIC enjoyed not only a trade monopoly but the government's agreement that it might directly negotiate with local rulers, and might engage in warfare to defend company privileges (though it was forbidden to initiate hostilities). It also enjoyed the right to control British citizens within company territory. As a joint-stock enterprise, the EIC was well suited to expensive long-distance trade, for its size meant it could raise more money and spread the risk involved over a larger group of investors, a strategy unavailable to small traders.

Pada kutipan di atas, diberikan gambaran umum tentang aktivitas kolonisasi Inggris di India yang berlangsung sejak abad XVII. Diuraikan bahwa India bukan sesuatu yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa negara dengan berbagai model pemerintahan dan masyarakat yang menganut berbagai macam agama serta menggunakan berbagai bahasa. Kedatangan bangsa Inggris terjadi saat India tengah dan utara berada di bawah kekuasaan Mogul.

Selain menggambarkan kondisi India, pengarang juga menguraikan posisi *East India Company* (EIC) yang didirikan pada tahun 1600 sebagai perusahaan yang mendominasi kegiatan kepentingan Inggris di India. Dijelaskan bahwa EIC sebagai perusahaan *chartered* memegang hak istimewa seperti monopoli perdagangan, mengusahakan aktivitas ekonomi dan militer di daerah yang dikuasai, serta membuat perjanjian politik dengan penguasa lokal.

Ditinjau wacana yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah SMA, khususnya dalam rangka penanaman identitas nasional, narasi yang paling menonjol adalah menempatkan bangsa Inggris sebagai bangsa yang hebat dan memperoleh banyak kesuksesan serta memiliki peran besar dalam percaturan dunia. Wacana itu dapat diketemukan hampir pada setiap topik yang dibahas oleh buku teks pelajaran sejarah, dari zaman kuno sampai kontemporer. Salah satu topik yang menampilkan penonjolan peran dan kehebatan Inggris adalah Perang Dunia II. Fenomena historis itu melibatkan berbagai negara dan berlangsung di berbagai kawasan. Dalam penelitian Foster terhadap empat buku teks pelajaran sejarah yang membahas tentang zaman modern ditemukan bahwa para pengarang menempatkan Perang Dunia II sebagai peristiwa yang cukup penting. Pentingnya fenomena historis itu dapat dilihat antara lain pada pemberian porsi uraiannya yang berkisar antara 7,32% - 12,5% atau dalam bentuk jumlah halaman antara 20 sampai dengan 38 halaman. Selain pemberian ruang yang

relatif besar terhadap topik Perang Dunia II, Foster juga menemukan bahwa para pengarang menceritakan fenomena historis itu dari perspektif Eropa Barat:

Although the textbooks vary in their respective portrayals of the war, two areas of emphasis appear most salient. First, all four of the English textbooks principally view the war from a western European or British perspective. Accordingly generous coverage is given to various topics including Blitzkrieg and the German army's rapid advance through Europe, the fall of France, the evacuation at Dunkirk, the Battle of Britain, the Blitz, the Battle of the Atlantic, the bombing of Germany, D-Day and the Allied advance towards Berlin in 1944 and 1945. Three books devote on average 14 pages to the span of events listed above. In contrast, attention to the war in the Pacific constitutes four pages in Todd, two pages in Walsh, a few paragraphs in McAleavy, and is entirely absent from the book authored by Ferriby and McCabe. Similarly, although events on the Eastern Front receive attention in every book, their portrayal varies from a maximum of four pages in Walsh to a few sentences in both Ferriby and McCabe and McAleavy. Significantly, apart from mention of military campaigns in North Africa, no other aspect of war receives more than a few sentences. Overall, therefore, textbooks concentrate detailed attention on conflicts in Western Europe with the war in the Pacific, in North Africa, and on the Eastern front generally receiving very cursory portrayal. Involvement of peoples and nations beyond these geographical areas is almost entirely ignored in contemporary history textbooks (Foster, 2005: 4).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa Foster menemukan para pengarang buku teks menggambarkan perang yang terjadi di Eropa Barat, khususnya Inggris, dengan relatif detail. Sebaliknya, perang yang terjadi di Pasifik memperoleh perhatian minimal, bahkan buku karangan Ferriby and McCabe sama sekali tidak menyinggungnya. Nasib yang hampir sama juga dialami dengan penjelasan Perang Dunia II di Afrika Utara yang disinggung hanya dalam satu dua kalimat.

Dalam menguraikan peran Inggris, para pengarang buku teks berusaha menyembunyikan sumbangsih dan pengalaman warga masyarakat dalam perang, baik masyarakat Inggris maupun *Commonwealth*. Mereka menekankan bahwa perang dilakukan oleh tentara Inggris dan beberapa kali menyebut tentara Sekutu dengan menonjolkan peran Amerika, dan Inggris. Keberadaan dan peran Soviet dalam Sekutu jarang sekali disebut, itu pun hanya ketika menjelaskan Perang Dingin. Perang Dunia II di Eropa Barat hanya digambarkan sebagai perang Inggris dan Amerika Serikat melawan Italia dan Jerman (Foster, 2005: 5).

Banyaknya penonjolan kesuksesan dan peran tentara Inggris dalam Perang Dunia II menunjukkan bahwa buku teks pelajaran sejarah Inggris menempatkannya sebagai pemeran utama dalam sejarah. Penempatan sebagai pemeran utama terhadap tentara Inggris dan tentu saja para pemegang kekuasaan dalam pemerintahan menunjukkan bahwa telah terjadi proses heroifikasi terhadap kelompok kepentingan. Pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang buku teks kepada para siswa sebagai audien bahwa tentara dan pemimpin Inggris memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap eksistensi dan berbagai pencapaian yang telah diraih oleh bangsa Inggris.

Heroifikasi tentara dan pemimpin politik Inggris dilakukan dengan menegasikan peran berbagai pihak yang sumbangsinya terhadap berbagai kemenangan pihak Sekutu tidaklah dapat dikatakan kecil. Pasukan Afrika Utara, India, Selandia Baru, Australia memiliki peran besar dalam mengalahkan Jepang dan negara-negara musuh lainnya. Akan tetapi peran mereka sangat sedikit disinggung, bahkan berbagai buku sama sekali tidak menyebutnya. Penegasian terhadap "others" itu merupakan representasi ketidakbersediaan para pengarang untuk mengakui peran penting mereka dan sekaligus sebagai usaha untuk menonjolkan kelompok kepentingan yang didukungnya sebagai satu-satunya pihak yang layak disebut pahlawan.

Penonjolan atau heroifikasi terhadap kelompok kepentingan semakin terlihat ketika membahas situasi Perang Dunia II di dalam negeri Inggris. Salah satu peristiwa historis di Inggris yang terkait dengan Perang Dunia II adalah Blitz. Secara leksikal, blitz artinya kilatan cahaya. Dalam sejarah Inggris, Blitz adalah istilah untuk menamakan perang antara Inggris dan Jerman, atau lebih tepatnya serangan Jerman ke Inggris. Serangan terjadi antara tanggal 7 September 1940 sampai dengan 21 Mei 1941. Selama hampir 37 minggu itu pasukan Jerman menjatuhkan kurang lebih 100 ton bom di 16 kota di Inggris. London memperoleh serangan 71 kali, Birmingham, Liverpool, dan Plymouth sebanyak 8 kali, kota Bristol 6 kali, Glasgow 5 kali, Southampton 4 kali, Portsmouth dan Hull tiga kali, dan delapan kota lainnya minimal 1 kali memperoleh serangan besar-besaran.

Di kota London, sekitar 1 juta rumah hancur dan rusak parah serta kurang lebih 20.000 korban meninggal. Berbagai pelabuhan dan pusat-pusat industri juga mendapat serangan hebat. Pelabuhan Liverpool misalnya mengalami rusak berat dan hampir 4.000 orang meninggal. Tidak jauh berbeda dengan itu adalah pelabuhan di kota Hull, dengan korban mencapai 1.200 orang korban meninggal dan 95% barang-barang mengalami rusak berat. Pelabuhan lain, seperti Bristol, Cardiff, Portsmouth, Plymouth, Southampton, dan Swansea juga menjadi target serangan udara pasukan Jerman. Hal yang sama juga terhadap kota-kota industri seperti Birmingham, Belfast, Coventry, Glasgow, Manchester, dan Sheffield. Bahkan Kota Coventry dapat dikatakan mengalami kehancuran total.

Blitz secara garis besar dapat dikatakan sebagai waktu yang penuh penderitaan bagi bangsa Inggris, karena secara bertubi-tubi memperoleh serangan udara dari Jerman tanpa mampu memberikan banyak perlawanan yang berarti. Akan tetapi, ketika peristiwa sejarah itu ditulis dalam buku teks pelajaran sejarah terlihat sangat berbeda. Crawford (2001: 328) menjelaskan sebagai berikut:

Lying at the heart of UK textbook treatment of the Blitz are unembellished images of heroic sacrifice, courage and a classless "togetherness". Built upon descriptive commentaries of the effect of air raids on Coventry, Liverpool, Southampton and London which" ... did not break the will of the people", the notion of the indomitable spirit of the British people is strongly portrayed. The Modern World, by Kelly and Rees, claims that despite the bombing "Britain's will to fight had not been broken:" A section called "Pulling Through" Britain and the World, claims that "During the war, everyone was equal and there was a community spirit" and "Some people say that the Blitz brought out the best in people". Suggest reasons for this?" The Teachers' Resource book for The Twentieth Century World by Shephard and Moore states that "Britain's cities were hit by the Blitz which killed hundreds of thousands of people. Yet despite that, the morale of people at home did not collapse. Many talk about the War as a good time, when families and communities worked together to help one another and defeat the Germans?" In a chapter called "Blood, Toil, Tears and Sweat", The Twentieth Century World acknowledges the importance of British propaganda in "keeping spirits up." It is claimed that "The BBC did a great deal to keep the nation's spirits up. Its news reports were thought to be honest and fair, so the people trusted what they heard".

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa para pengarang buku teks pelajaran berusaha mengambil sisi positif dari serangan udara Jerman, seperti lahirnya semangat berkorban dan berkembangnya kebersamaan antar warga. Kelly dan Rees dalam bukunya yang berjudul *The Modern World* mengklaim bahwa meski memperoleh serangan bom bertubi-tubi, "semangat tempur bangsa Inggris tidak menjadi patah". Hal yang hampir sama ditulis oleh Shephard dan Moore dalam buku guru *The Twentieth Century World*. Mereka berdua menyatakan bahwa meski kota-kota di Inggris diserang dengan bom dan ratusan ribu terbunuh, tetapi moral penduduk tidak kemudian hancur.

Kesan yang sama diberikan oleh Clive Ponting dalam bukunya *1940: Myth and Reality* terhadap cerita yang disampaikan isi buku teks pelajaran Inggris. Dia antara lain

menggambarkan isi buku teks sebagai berikut:

I can still remember the impact that reading Churchill's history of the Second World War had on me many years ago; its wonderful language redolent of Macaulay and Gibbon, its dramatic story so clearly told... The old policy of appeasement and British weakness disappeared under Churchill's inspiring leadership. Immediately on taking office he had to face the collapse of France caused by the numerically superior and highly mechanized German army using waves of modern tanks in a new style of blitzkrieg warfare. The British army, let down by the French and betrayed by the Belgians, fought its way back to the coast, where it was evacuated by a fleet of small boats from the beaches of Dunkirk. Left alone, the British government, refusing even to entertain the possibility of peace with Germany, decided to fight on to final victory. Facing a determined threat to invade Britain, brilliant direction of the RAF defeated a German air force that held all the advantages in the Battle of Britain. Morale in Britain remained high, as the country, united as never before and inspired by Churchill's regular radio broadcasts, was guided by a benevolent government which had great faith in the strength and steadfastness of the British people. The Blitz, one of the heaviest bombing campaigns ever mounted, began when Hitler started the policy of bombing major cities. Well-prepared and efficiently organized emergency services ensured that there were few problems in dealing with the results of the Blitz. Churchill, working closely with his friend President Roosevelt and taking advantage of the strong identity of interest between Britain and the United States, brought the Americans to the brink of entering the war. By the end of 1940, Britain was still a great power and firmly established on the road to victory.

When we examine the historical record, however, not one of these statements turns out to be true. (Ponting, 1991: 1).

Pada kutipan di atas, Ponting sebagai pembaca isi buku teks pelajaran sejarah Inggris memperoleh pesan bahwa Inggris ditinggalkan oleh Perancis dan dikhianati Belgia, sehingga harus bertempur sendiri melawan Jerman. Meski demikian, pemerintah sama sekali tidak mau menyerah. Semangat bangsa Inggris tetap tinggi, bahkan persatuan menjadi sangat kokoh berkat pidato rutin Churchill di radio serta menjadikan semangat perang terbakar. Churchill juga menjalin kerjasama dengan Presiden Roosevelt untuk memperjuangkan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1940, Inggris tetap menjadi negara super power dan dengan sangat meyakinkan menuju ke kemenangan. Pada alinea terakhir, Ponting menutup uraiannya dengan menyatakan bahwa ternyata semuanya tidak sesuai dengan sumber-sumber sejarah yang ada. Dari sudut pandang ini, telah terjadi mitologisasi fenomena historis yang dilakukan oleh pengarang buku teks pelajaran sejarah.

Ingatan kolektif yang bernuansa mitologisasi dinarasikan dan ditanamkan kepada generasi muda tidak hanya melalui buku teks, tetapi juga melalui film, untuk tujuan kelompok kepentingan:

... Because of newly available Ministry of Information funding, to boost civilian morale and to promote Britain's cause to undecided neutrals, Jennings found a focus for his disparate talents and influences as the GPO was reformed as the Crown Film Unit. Jennings's output is regarded as among the best records of this 'People's War' in any national cinema (Aitken, 2013: 453).

Pada kutipan di atas pemerintah melalui Departemen Penerangan menggunakan fenomena historis untuk mengembangkan kepribadian nasional Inggris, seperti tahan banting, keberanian, heroik, teguh, taat, mampu mengendalikan emosi dan memiliki selera humor. Bahkan usaha mitologisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pelajaran sejarah di sekolah, tetapi Departemen Penerangan juga menggunakan media film dokumenter yang dibuat oleh Jennings.

Selain tentang peperangan, ingatan kolektif lain yang diwariskan melalui buku teks pelajaran sejarah, seperti dialami oleh Ponting, adalah peran besar Perdana Menteri Churchill.

Churchill is presented as the central figure in the construction of national morale. Britain and the World: the 20th Century, by Lancaster and Lancaster, provides three pages on his life and career and The Era of the Second World by Lancaster and Peaple four pages. Key Themes of the 20th Century, by Sauvain, quotes extracts from some of Churchill's speeches, which have a key place in the mythology of the Blitz, urging " ... his fellow countrymen to stand firm" (1996: 121). Twentieth Century World, by Robson evokes the memory of Churchill as a "Great War leader"³⁰ and as a role model for resistance (Crawford, 2001: 329).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa pengarang buku teks menempatkan Churchill sebagai tokoh panutan saat bangsa Inggris menghadapi masa-masa sulit saat Perang Dunia II meletus. Heroifikasi terhadap Churchill juga dapat ditemukan pada buku karangan Addison (2005) yang berjudul *Churchill: The Unexpected Hero*. Pada buku itu, Addison (2005: 170-171) antara lain menuliskan sebagai berikut:

How representative Mass-Observations respondents were of the public in general is impossible to say. But they do suggest that most people regarded Churchill first as a truly great man, and secondly as the right man for the job (with the strong implication that he might not be the right man in peacetime). Churchill breathed a fighting spirit that inspired confidence, but he did so as an intensely human being who awoke love and respect rather than fear. Tom Harrison was present when Churchill, accompanied by Clementine, visited Plymouth immediately after the bombing of the city in May 1941:

Wacana kesuksesan dan kehebatan Inggris yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah bukan tanpa tantangan. Era keterbukaan informasi dewasa ini sangat memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses informasi yang diperlukan dan menemukan kebenaran masing masing. Sealur dengan itu, sumber-sumber sejarah, termasuk dokumen-dokumen pemerintah yang pada zaman dahulu dikategorikan sebagai rahasia negara, tidak sedikit yang sekarang ini telah dibuka untuk umum. Akibatnya banyak perspektif dan interpretasi narasi sejarah yang dikritik serta didekonstruksi. Salah satu yang memperoleh kritik adalah mitifikasi Blitz dan heroifikasi Churchill. Crawford (2001: 331) mencatat bahwa dampak serangan Jerman mengakibatkan masyarakat Inggris panik dan histeris. Jiwa mereka tergoncang dan semangat mereka rapuh. Bahkan berbagai kalangan memilih untuk meninggalkan kota dan mengungsi ke daerah-daerah yang aman. Gambaran itu jauh dari apa yang diuraikan dalam buku teks pelajaran sejarah.

Selain perbedaan klaim akibat dari perbedaan sumber sejarah yang digunakan, permasalahan lain yang cukup pelik adalah memperkokoh persatuan nasional bangsa Inggris. Realitas politik masa lalu menunjukkan bahwa integrasi nasional menjadi Kerajaan Inggris Raya tidaklah berlangsung dengan damai dan dikehendaki oleh semua pihak yang berkepentingan, tetapi melalui jalan pemaksaan menggunakan kekerasan. Realitas politik masa lalu itu sebenarnya sudah diperhalus dan diperlunak oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah. Usaha itu antara lain dapat disimak pada uraian Levine sebagai berikut:

Three Acts of Union from the sixteenth to the very start of the nineteenth century cemented the legal, political and economic relationships between dominant England and the so-called Celtic fringe of Wales, Scotland and Ireland. These relationships, which by the nineteenth century saw all these regions directly ruled from the Westminster parliament, are often dubbed 'internal colonialism'. Bringing Wales, Scotland and Ireland within a broader British realm represents some of England's earliest forays into colonial rule, for though the formal statutes linking these countries take us through to the nineteenth century, English interest in and often coercion of these neighbouring regions has a very much longer history.

Pada kutipan di atas Levine menjelaskan bahwa tiga undang-undang tentang Union (Penyatuan) dari abad ke-17 sampai awal abad ke-19 diperkokoh dengan hubungan legal, politik dan ekonomi antara England yang dominan dengan Wales, Scotlandia dan Irlandia. Pada abad XIX semua wilayah itu secara langsung diperintah oleh Parlemen Westminster

yang sering dijuluki sebagai kolonialisme internal. Lebih lanjut Levine menguraikan proses penyatuan dengan Wales sebagai yang pertama berada di bawah kontrol England, yaitu pada tahun 1536 dengan munculnya Undang-Undang Penyatuan yang melahirkan 27 pemilih parlemen dari Wales.

Integrasi yang terjadi secara “tidak alamiah” yang diwariskan melalui buku teks menjadi salah satu penyebab penting munculnya fragmentasi identitas nasional, yaitu sebagai bangsa Inggris. Pada penelitian Ipsos Mori tahun 2006 yang dilakukan untuk yayasan Camelot terhadap generasi muda di London, Birmingham, Plymouth, Cardiff, Belfast dan Glasgow menemukan fenomena yang berbeda, bahkan bertentangan, dengan tujuan pendidikan sejarah.

The research uncovers a fundamental lack of emotional resonance amongst young people with the concept of Britishness which is seen as a static attribute that cannot be changed or re-configured. The findings suggest strongly that current notions of Britishness go against the 'project of being young' and the state of flux that comes with adolescence.

Spontaneous associations with Britishness amongst young people include the Queen, tea and crumpets, and Big Ben etc, which are rather “old world” versions and do not reflect a contemporary Britain or social reality. For many young people Britain represents an old, hierarchical, traditional, political discourse that does not fit with the fresh, inventive, messy and often chaotic world of a teenager (Ipsos Mori, 2006: 3).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa generasi muda memandang konsep tentang *Britishness* atau Bangsa Inggris sebagai hal yang terkait dengan zaman kuno, seperti ratu, acara minum teh, Big Ben dan sebagainya. Pandangan yang semakin keras ditemukan pada generasi muda dari Wales, Skotlandia, dan generasi muda Katolik di Irlandia Utara, yaitu Inggris identik sebagai arogan, superior dan agresif.

In Wales, Scotland and for Catholic participants in Northern Ireland they see the English as arrogant, superior and aggressive. Their opposition to the English means that they are hesitant in accepting a British identity because they think it places them in the same camp as the English. These nations want to be recognised as culturally and attitudinally different from the English. They also want to be seen as distinct and rich cultures in themselves. For Catholic participants in Northern Ireland the political, religious and historical associations that accompany the 'British' cannot be overstated (Ipsos Mori, 2006: 3).

Hasil penelitian Ipsos menggambarkan terjadinya konflik identitas nasional Inggris dengan berbagai negara bagian yang pada masa lampau merupakan bangsa merdeka. Bahkan Di Skotlandia berkembang wacana untuk memisahkan diri dari Inggris dan kembali menjadi negara merdeka. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan menteri pertama dari Skotlandia, yaitu Alex Salmond, pada 15 Oktober 2012 menandatangani persetujuan pengadaan Referendum Kemerdekaan Skotlandia (Pedersen, 2013: 3). Akhirnya pada tanggal 18 September 2014 referendum dilaksanakan dengan hasil 2,001,926 orang memilih “Tidak” dan 1,617,989 orang memilih “Ya” untuk merdeka. BBC melaporkan bahwa “*from all 32 council areas, the "No" side won with 2,001,926 votes over 1,617,989 for "Yes"* (BBC 19 September 2014). Meskipun hasilnya dimenangkan oleh kelompok *unionist*, yaitu kelompok yang menghendaki tetap bergabung dengan Inggris, tetapi referendum itu menunjukkan adanya keterpecahan identitas nasional.

B. Pelajaran Sejarah di Indonesia

Buku karangan Tarunasena M., 2009, *Sejarah SMA/MA*. Jilid 2 merupakan satu-satunya yang lolos seleksi BSNP untuk kelas 11. Dalam buku itu digunakan pendekatan struktural. Hal itu terlihat dari susunan bab 7 yang secara khusus dialokasikan untuk membahas pergerakan nasional. Bab 7 dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu (a) Paham-paham baru di Eropa, (b)

Perkembangan nasionalisme di Asia dan pengaruhnya terhadap perkembangan nasionalisme di Indonesia, dan (c) Keragaman ideologi pergerakan kebangsaan Indonesia. Dari susunan sub bab tersebut tampak bahwa sub bab terakhir, yaitu keragaman ideologi pergerakan kebangsaan Indonesia (struktur lokal), ditempatkan sebagai akibat dari sub bab pertama (struktur dunia) dan kedua (struktur regional dan kolonial).

Dalam uraian, penggunaan pendekatan struktural terlihat antara lain pada pembukaan bab 7 sebagai berikut:

Pada abad ke-19, di kawasan Eropa muncul berbagai pemikiran yang berkenaan dengan kehidupan umat manusia. Lahirnya pemikiran pada abad tersebut tidak hanya berpengaruh di kawasan Eropa saja, tetapi mampu *memberikan kekuatan yang besar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai asasi kemanusiaan, terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan hidup manusia. Adapun pemikiran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemikiran nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi* (Tarunasena, 2009, jilid 2: 200).

Pada kutipan di atas uraian buku teks secara jelas menempatkan hasil pemikiran Eropa sebagai faktor yang memberi kekuatan kepada masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya, terutama dalam masalah kemerdekaan hidup manusia. Meskipun demikian, pada uraian selanjutnya tidak dijelaskan bentuk keterkaitan antara paham-paham baru tersebut dengan pergerakan nasional Indonesia. Pada sub bab paham-paham baru, buku teks hanya menjelaskan pengertian dan dinamika historis paham-paham tersebut di Eropa.

Pada sub bab kedua, yaitu tentang nasionalisme Asia, dijelaskan kemajuan Jepang akibat restorasi Meiji dan pada bagian penutup diuraikan sebagai berikut:

Keberhasilan bangsa Jepang mengadakan Restorasi dengan memodernisasi diri dan keberhasilan mengusir bangsa Barat dari dalam negeri dapat mendorong bangsa-bangsa Asia untuk berbuat seperti Jepang, khususnya bangsa-bangsa di Asia yang mengalami penjajahan dari bangsa Barat seperti Indonesia yang dikuasai oleh Belanda (Tarunasena, 2009, jilid 2: 208).

Pada kutipan di atas terlihat bahwa kata kunci yang mengindikasikan adanya hubungan atau keterkaitan antara nasionalisme Jepang dengan Indonesia adalah “dapat mendorong”. Dari sudut pandang ini, penggunaan kata “dapat” di depan kata kerja “mendorong” menunjukkan bahwa buku teks masih ragu terhadap ada tidaknya keterkaitan, karena makna kata “dapat” dalam konteks itu adalah mungkin mendorong atau mungkin tidak mendorong.

Meski bernuansa kekurangpastian, usaha untuk memberi keterkaitan antara nasionalisme Jepang dengan Indonesia merupakan hasil terbaik. Apabila disimak lebih lanjut, terutama ketika membahas dinamika nasionalisme di Cina, India, Filipina, Vietnam, dan Myanmar, buku teks karangan Tarunasena sama sekali tidak menyinggung keterkaitannya dengan pergerakan nasional di Indonesia. Dengan kata lain, uraian tentang nasionalisme Asia yang memakan cukup banyak halaman tersebut nasibnya sama dengan penjelasan paham-paham baru di Eropa, yaitu sama sekali tidak memberi penjelasan terhadap kelahiran pergerakan nasional Indonesia.

Permasalahan ketiadaan penjelasan yang memadai tentang keterkaitan topik yang dibahas dengan lahirnya pergerakan nasional juga ditemukan pada uraian sub bab terakhir bab 7. Dalam sub-sub bab “Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional” diuraikan kondisi dalam struktur kolonial, antara lain kondisi politik sebagai berikut:

Kondisi politik yang dimaksud adalah kondisi yang berhubungan dengan masalah kekuasaan pemerintahan Kolonial. Sejak Kolonial menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kekuasaan pribumi tradisional yang berada dibawah seorang raja atau sultan sedikit demi

sedikit mulai dihapus dan akhirnya hilang sama sekali. Kekuasaan mulai berganti kepada tangan Kolonial. Raja-raja diangkat dan diberhentikan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kolonial. Setiap penguasa lokal yang diangkat dan diberhentikan oleh Kolonial pada dasarnya telah terikat oleh kontrak politik yang menyatakan bahwa daerah yang mereka kuasai harus diakui sebagai bagian dari kekuasaan Kolonial Belanda. Begitu pula dengan para Bupati dan Lurah, mereka dijadikan sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dan harus taat terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kolonial. Dalam kondisi yang demikianlah wibawa seorang raja, sultan, bupati, dan juga lurah menjadi merosot di mata rakyat. Mereka dipandang lemah dan tidak mempunyai kekuatan, sehingga menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan pemerintah Kolonial (Tarunasena, 2009, jilid 2: 214-215).

Pada kutipan di atas dijelaskan terjadinya kemerosotan kekuasaan politik pemimpin pribumi hingga posisinya sekedar menjadi kepanjangan tangan struktur kolonial. Akan tetapi, buku teks sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan kemerosotan kekuasaan itu dengan kelahiran pergerakan nasional Indonesia. Dengan kata lain, kemerosotan kekuasaan pemimpin pribumi dan kelahiran pergerakan nasional Indonesia merupakan dua fenomena historis yang tidak saling berkaitan.

Penjelasan yang menunjukkan keterkaitan kuat terletak pada uraian tentang kondisi pendidikan. Buku karangan Tarunasena (2009, jilid 2: 215-216) antara lain menuliskan sebagai berikut:

Pada awal abad ke-20 dengan penerapan *politik etis*, barulah pendidikan mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia-Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan disesuaikan dengan status sosial yang ada dalam masyarakat dengan sistem pendidikan yang tidak jauh dari kepentingan Kolonial. Melalui pendidikan, para pelajar memperoleh banyak wawasan, terutama mengenai perkembangan yang terjadi di Barat, kemudian dibandingkan dengan kondisi bangsa Indonesia. Dari perbandingan itulah lahir kesadaran untuk mengadakan perbaikan nasib bangsa melalui berbagai pergerakan nasional seperti yang terdapat di beberapa negara terjajah lainnya.

Selama menjalani proses pendidikan, para golongan terpelajar ini mendapat wawasan baru tentang berbagai paham-paham baru yang berkembang dan berpengaruh kuat di kawasan Eropa dan Asia-Afrika, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Melalui media pendidikan, wawasan para pelajar mengenai berbagai hal menjadi semakin terbuka, termasuk wawasan tentang berbagai pergerakan nasionalisme yang terjadi di berbagai negara. Selanjutnya para pelajar ini mencoba mencontoh dan menerapkan semangat paham-paham baru tersebut, terutama paham nasionalisme yang telah diperjuangkan oleh negara-negara lain ke dalam perjuangan Indonesia. Melalui paham nasionalisme ini, para pelajar sebagai golongan elit berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Hal tersebut didorong adanya keyakinan bahwa untuk mencapai keberhasilan cita-cita kemerdekaan Indonesia, hanya dapat dicapai apabila ada persatuan dan kesatuan bangsa. Keyakinan akan semangat persatuan dan kesatuan bangsa tersebut kemudian mereka wujudkan dalam Pergerakan Nasional, yaitu suatu pergerakan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan Barat berhasil menginfuskan "*banyak wawasan, terutama mengenai perkembangan yang terjadi di Barat*". Dari informasi tersebut, para pelajar kemudian memperbandingkan dengan "*kondisi bangsa Indonesia*" dan berpuncak pada lahirnya "*kesadaran untuk mengadakan perbaikan nasib bangsa melalui berbagai pergerakan nasional*". Bahkan pada alinea kedua, dijelaskan kehebatan sistem pendidikan Barat sebagai berhasil membuka wawasan para siswa tentang "*paham-paham baru yang berkembang dan berpengaruh kuat di kawasan Eropa dan Asia-Afrika, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi*", sehingga mereka "*mencontoh dan menerapkan semangat paham-paham baru tersebut*" dalam wujud

“*perjuangan Indonesia*”. Dari sudut pandang ini, buku teks menjelaskan bahwa pendidikan Barat sebagai satu-satunya institusi yang melahirkan pergerakan nasional Indonesia.

Ditinjau wacana yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah, khususnya dalam rangka penanaman identitas nasional, narasi yang paling menonjol adalah menempatkan kebudayaan Barat pada umumnya dan struktur kolonial sebagai determinan. Pola pemikiran itu dapat disimak pada buku teks karangan Tarunasena. Penempatan kebudayaan Barat sebagai kekuatan determinan tidak hanya tampak pada uraian, tetapi juga pada kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa. Pada uraiannya tentang paham nasionalisme dijelaskan:

Pada dasarnya semangat nasionalisme di satu sisi mampu mewujudkan kehidupan negara dengan semangat kebangsaan yang tinggi, namun di sisi lain semangat nasionalisme yang dilandasi sikap berlebihan menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya semangat kolonialisme yang merugikan bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika, termasuk di Indonesia. Namun pada perkembangan berikutnya, kita dapat melihat bahwa melalui nasionalisme ini pula bangsa-bangsa terjajah seperti Indonesia dapat bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah (Tarunasena, 2009, jilid 2: 203).

Pada halaman 206, dalam buku teks dicantumkan kegiatan siswa sebagai berikut:

Kegiatan 7.1

Cari di internet atau di media surat kabar atau sumber lain yang berhubungan dengan paham-paham tersebut di atas. Selanjutnya, jelaskan hubungan paham-paham tersebut dengan munculnya pergerakan nasional di Indonesia?

Dari kedua kutipan di atas kiranya dapat diambil pemahaman bahwa kebudayaan Barat merupakan sumber pemikiran atau inspirasi bagi dinamika historis dunia non Barat, termasuk Indonesia. Pada kutipan pertama, nasionalisme ditempatkan sebagai “salah satu faktor pendorong lahirnya semangat kolonialisme yang merugikan bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika, termasuk di Indonesia”. Dari sudut pandang itu, kebudayaan Barat dipandang sebagai sumber kemalangan dunia non Barat, yaitu Asia dan Afrika. Akan tetapi, pada kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa “melalui nasionalisme ini pula bangsa-bangsa terjajah seperti Indonesia dapat bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah”. Kalimat itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah yang berkembang di antara bangsa non Barat adalah bersumber dari kebudayaan Barat. Dengan berlandas pada uraian yang telah diberikan, kegiatan siswa yang diberikan lebih merupakan usaha menginternalisasi pandangan deterministik yang dimiliki pengarang kepada para siswa, daripada memberi kesempatan kepada mereka untuk mengkritisnya.

Pandangan deterministik yang menempatkan Barat sebagai sumber kemajuan Indonesia bukan sesuatu yang aneh dan hanya dimiliki Tarunasena. Pandangan itu sudah cukup lama menjadi *mainstream* di Indonesia, terutama di kalangan sejarawan dan guru sejarah. Salah satu kajian sejarawan Barat yang banyak dirujuk oleh sejarawan Indonesia, termasuk di dalamnya para pengarang buku teks, yaitu karya Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* yang terbit pada tahun 1960 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1984. Tesis yang diangkat Niel adalah bahwa semua elite modern Indonesia merupakan hasil didikan Barat dan paling sedikit telah mengadopsi beberapa aspek kebudayaan Barat. Mereka digambarkan sebagai “lebih bersifat Barat dalam pendidikan dan pengajarannya dan dalam konsepsinya mengenai negara dan masyarakat” (Niel, 2009: 43). Oleh karena itu, menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial sebagai *trigger* munculnya elite modern Indonesia merupakan konsekuensi logis dari posisi yang diambilnya. Pada tahap selanjutnya Achmad dan Hoessein Djajadiningrat yang menjadi anak asuh Snouck Hurgronje

menjadi ikon sukses proyek westernisasi pemuda pribumi Indonesia:

Snouck merupakan alat dalam menguasai sebagian kaum ningrat Banten (Jawa Barat) untuk mengikuti pendidikan cara Barat dan telah berhasil dengan menggembirakan pada anak didik percobaannya Achmad Djajadiningrat, belakangan menjadi *regen* di Serang dan pegawai tinggi pemerintah, yang telah ditolongnya masuk dan menyelesaikan Sekolah Menengah Belanda di Batavia... Adik Achmad, Hoessein, juga mengikuti cara pendidikan Barat dan malah lebih sukses lagi bagi Snouck Hurgronje, Hoessein mengikuti tradisi akademis penuntutnya, yang berakhir dengan menamatkan studinya dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan liberal di Universitas Leiden (Niel, 2009: 77-78).

Untuk memperkuat tesisnya, Niel berusaha mem-Barat-kan semua fenomena historis yang terkait dengan muncul dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Salah satu analisisnya terhadap berdirinya Sarekat Dagang Islam yang notabene berjiwa bukan Barat adalah sebagai berikut:

Karena Samanhudi sendiri tidak mempunyai waktu maupun bakat untuk membentuk suatu organisasi, ia pun berusaha mencari seorang direktur-organisor. Pilihannya jatuh pada seorang yang telah mempunyai pengalaman dalam organisasi perdagangan: Raden Mas Tirtoadisuryo...Tirto telah mendapat pendidikan sekolah administratur (OSVIA) (Niel, 2009: 135)

Di kalangan sejarawan Indonesia yang sepemahaman dengan Robert van Niel adalah pandangan Kartodirdjo (2005: 197) yang menempatkan bangsa Barat sebagai tipe ideal:

...di lingkungan peradaban Barat modern bersama dengan tumbuhnya rasionalisme dan individualisme, tumbuh pula *ascetisme* intelektual, yang mampu menciptakan motivasi yang kuat untuk berilmu dan berfilsafah. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat terjadi tanpa adanya *ascetisme* itu, suatu unsur pokok dalam kebudayaan akademis dan *expertise*.

Kebudayaan industrial sudah barang tentu memerlukan dukungan kebudayaan akademis tersebut beserta *ascetismenya*, rasionalitas serta individualitasnya. ..

Norma-norma yang diinstitutionalisasikan perlu untuk dilegitimasikan oleh nilai-nilai tersebut di atas. Hal itu berlaku juga bagi konsep kerja serta nilai kerja seperti termaktub dalam etos kerja.

Pada kutipan di atas, Kartodirdjo, sejarawan yang sangat disegani dan pemikirannya banyak diikuti oleh sejarawan lain pada zamannya, menjelaskan bahwa kebudayaan akademis Barat dengan *ascetisme*, rasionalitas serta individualitasnya menjadi pendukung penting dari berkembangnya kebudayaan industrial.

Kekaguman terhadap kebudayaan industrial Barat melahirkan keinginan agar bangsa Indonesia menyerap berbagai unsurnya. Mereka berkeinginan agar Indonesia berubah menjadi berbudaya industrial seperti Barat. Kelompok ini dalam masyarakat luas menyebut diri sebagai "*agent of change*", dan dalam komunitas sejarawan dinamakan oleh Sutherland sebagai "Sejarawan Profesional Modern" (SPM). Karakteristik SPM adalah usaha untuk menampilkan sejarah sebagai kemajuan yang berpuncak pada kejayaan "*modernitas*" negara-bangsa sebagai narasi utama atau *grand narration*.

Narasi besar SPM bersifat teleologis dalam arti menyajikan semua bergerak ke arah satu tujuan tertentu, sebagai perkembangan dari hal yang sederhana dan tidak sempurna ke hal yang kompleks, rasional dan efisien. Oleh sebab itu, Francis Fukuyama (1992) dapat mengatakan keruntuhan Uni Soviet sebagai pertanda dari "*akhir sejarah*" karena jika model demokrasi pasar bebas Barat, atau Amerika, telah menjadi pola yang diterima seluruh umat manusia, maka sejarah sudah hampir sampai pada tujuan akhirnya. (Sutherland dalam Nordholt, Purwanto dan Saptari, ed., 2008: 34 35).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa SPM menampilkan sejarah Indonesia sebagai dinamika perubahan/kemajuan sebagai akibat penyerapan unsur-unsur Barat dalam masyarakat. Dengan kata lain, konstruksi sejarah yang dihasilkan SPM berpola pada pergerakan masyarakat meninggalkan tradisinya untuk diganti dengan nilai, norma, dan institusi Barat. Kartodirdjo, sebagai tokoh utama SPM, menjelaskan bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat mengalami proses disfungsi sebagai berikut:

Tidak dapat disangkal, bahwa nilai-nilai tradisional berfungsi penuh dalam konteks zamannya, yaitu sewaktu tingkat ekonomi masih bercorak agraris dan sistem politik masih bersifat feodal. Dengan perkembangan ekonomi serta meningkatnya menjadi semi-industrial, maka nilai-nilai menjadi disfungsi. Masyarakat agraris dengan produksi tradisional lebih mengutamakan nilai-nilai kolektivitas, solidaritas komunal, ikatan primordial, seperti ikatan keluarga, suku, kepercayaan, lokasi dan sebagainya.

Tanah dan tenaga sangat terikat pada sistem sosial desa dan kekuatan feodal, belum terarah kepada kekuatan ekonomi pasar. Kehidupan di desa lebih terarah ke dalam dan tingkat kehidupan ada pada taraf subsistensi. Dalam situasi ekonomi sosial seperti itu, timbul sindrom kemiskinan yang mencakup pasivisme, fatalisme, familisme, indolensi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menciptakan karakteristik yang stereotipikal rakyat pedesaan yang serba malas (Kartodirdjo, 2005: 199).

Dari kutipan di atas dapat disimak bahwa SPM menempatkan kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia dalam oposisi biner. Dalam konteks ini, penempatan kebudayaan Barat sebagai *term superior* dipandang “*not only the object of a particular knowledge, but also the object of a vision*” (Spivak dalam Derrida, 1997: lviii). Sebaliknya, pernyataan bahwa masyarakat desa, simbol kebudayaan Indonesia tradisional (turun temurun), oleh Kartodirdjo dinegasikan sebagai diwarnai pasivisme, fatalisme, familisme, indolensi dan serba malas. Pandangan itu menjadikan konstruksi sejarah Indonesia tidak lagi menarasikan *change and continuity* secara seimbang, tetapi diarahkan untuk menonjolkan perubahan atau *change* serta meminimalisasi dan bahkan mengeliminasi *continuity*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan terhadap buku teks pelajaran sejarah di Inggris dan Indonesia dapat diambil pemahaman bahwa antarkeduanya memiliki kemiripan, yaitu secara teleologis keduanya digerakkan oleh kepentingan untuk mengembangkan generasi muda pada kehidupan ideal menurut perspektif pengarang. Di Inggris kehidupan ideal itu diformulasikan dalam kata *Britishness* atau keinggrisan, yaitu karakter ideal yang menjadi ciri khas bangsa Inggris. Di pihak lain, di Indonesia kehidupan ideal itu diformulasikan dalam kata “Kebudayaan industrial Barat”, yaitu karakter rasionalisme dan individualisme yang menjadi ciri khas bangsa-bangsa Barat.

Dari sudut pandang pendekatan yang digunakan, buku-buku teks pelajaran sejarah di Inggris menggunakan naratif modern. Pendekatan itu dipandang memiliki banyak keunggulan, antara lain fleksibilitas gaya bahasa dengan tetap mentaati berbagai kaidah keilmuan dari sejarah. Penggunaan pendekatan naratif menjadikan buku teks dimungkinkan disusun dengan gaya bahasa yang sesuai usia siswa. Melalui gaya bahasa naratif yang sesuai usia audience, siswa mampu lebih mudah memahami berbagai uraian sejarah yang disusun oleh pengarang buku teks. Di pihak lain, pengarang juga lebih mudah menyesuaikan uraian buku teks pelajaran sejarah dengan tujuan kognitif yang telah ditentukan oleh kurikulum.

Penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan usia siswa lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan afektif kurikulum pelajaran sejarah. Siswa menjadi tidak hanya mampu

memahami fenomena historis, tetapi juga simpati terhadap berbagai kejadian yang dialami oleh bangsanya di masa lampau. Pengarang buku teks pelajaran sejarah juga lebih leluasa menggunakan gaya bahasa yang dipandang mampu membangun *linguistic connection* antara generasi pelaku sejarah dengan generasi siswa yang hidup di zaman sekarang, sehingga antarkeduanya terjadi dialog reflektif.

Secara garis besar, pendekatan yang digunakan oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah di Indonesia adalah pendekatan ilmu sosial. Keunggulan dari pendekatan itu adalah kemampuannya menjelaskan latar belakang terjadinya fenomena sejarah. Dengan bantuan konsep dan teori dari ilmu sosial, sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa sejarah dapat dijelaskan dengan sangat mendalam. Permasalahannya adalah pendekatan itu hanya mampu digunakan secara baik oleh sejarawan akademik dan hampir tidak mungkin digunakan oleh para guru sejarah, pengarang buku teks, apalagi siswa SMA. Pengarang buku teks hanya menduplikasi dan mereproduksi hasil rekonstruksi sejarah yang dilakukan sejarawan akademik. Siswa SMA hampir tidak mungkin memahami teori dan konsep ilmu sosial yang digunakan sejarawan akademik, sehingga hampir pasti sebaik apapun eksplanasi yang tertuang dalam buku teks, akan jatuh menjadi hafalan tak bermakna bagi mereka. Dengan kata lain, penggunaan pendekatan ilmu sosial lebih merupakan *show of force* sejarawan akademik di dunia pendidikan.

Selain eksplanasi latar belakang peristiwa sejarah secara mendalam, karakter lain dari pendekatan ilmu sosial adalah digunakannya gaya bahasa ilmiah dan banyaknya istilah-istilah teknis. Dari sudut pandang tujuan pendidikan, penggunaan gaya bahasa ilmiah dan istilah teknis itu menunjukkan bahwa tujuan utama pembelajaran sejarah adalah pengembangan aspek kognitif. Oleh karena itu, akibat atau konsekuensi logis dari penggunaan pendekatan ilmu sosial adalah terabaikannya aspek afektif.

Dari perspektif wacana identitas nasional yang dikembangkan, Inggris memproduksi narasi sejarah yang menempatkan bangsa Inggris subjek sejarah atau pemeran utama dalam peristiwa sejarah. Dengan narasi itu diharapkan siswa mampu terinspirasi untuk menjadi manusia independen yang berani mengambil berbagai keputusan bagi hidupnya sendiri dan bagi kemajuan masyarakat.

Selain sebagai subjek, buku teks pelajaran Inggris juga didominasi oleh narasi tentang peristiwa sejarah yang membanggakan, yaitu kesuksesan, kemenangan dan peran besar yang dimainkan bangsa itu dalam mempertahankan kepentingan nasional dan percaturan internasional. Melalui narasi itu, diharapkan para siswa mampu terinspirasi berbagai kerja keras yang dilakukan oleh para tokoh/pelaku sejarah dalam berjuang meraih kemenangan atau kesuksesan.

Di pihak lain, buku teks pelajaran sejarah Indonesia menempatkan bangsa Indonesia sebagai objek kekuatan asing, terutama Barat. Hal itu antara lain dimanifestasikan dalam bentuk dominasi narasi sejarah tentang semakin meluasnya pengaruh Barat yang menghancurkan struktur masyarakat tradisional Indonesia. Melalui narasi itu diharapkan siswa bersedia dan mampu meninggalkan karakter asli yang diwarisi dari nenek moyangnya serta menyerap nilai-nilai utama kebudayaan Barat, yaitu rasionalisme dan individualisme, untuk mengembangkan kehidupan diri maupun masyarakat menuju negara industri. Permasalahannya adalah narasi yang dikembangkan dalam buku teks melawan kodrat alam bahwa kehidupan merupakan mata rantai yang saling terkait. Usaha gunting putus itu justru melahirkan generasi baru yang berhasil, meski tidak sepenuhnya, meninggalkan karakter tradisional, tetapi gagal menyerap karakter Barat.

B. Saran

Dengan berdasar pada kajian tentang historiografi pendidikan di kedua bangsa, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan naratif modern. Selama ini, penulisan buku teks pelajaran sejarah Indonesia menggunakan pendekatan ilmu sosial, terutama ketika menjelaskan masa penjajahan dan lahirnya nasionalisme Indonesia. Bahasa ilmiah dan teknis yang digunakan dalam pendekatan ilmu sosial sangat sulit diterima oleh siswa yang belum banyak memiliki kekayaan konsep dari ilmu sosial yang memadai. Selain itu, bahasa ilmiah yang digunakan kurang menarik dan sesuai dengan usia siswa yang masih tergolong remaja.

Pengembangan ini tidak mudah dilakukan, karena pendekatan ilmu sosial sangat kuat mendominasi perkembangan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan penggunaan pendekatan naratif modern bagi penulis/pengarang buku teks pelajaran sejarah, dan guru sejarah. Bahkan pada jangka panjang, pendekatan naratif perlu dijadikan mata kuliah, baik di program studi sejarah maupun pendidikan sejarah.

2. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia perlu dikembangkan dengan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama. Selama ini telah diusahakan untuk mengembangkan Indonesiasentrisme yang digagas oleh Kartodirdjo, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Penempatan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama selama ini masih terbatas pada usaha memperbanyak jumlah orang Indonesia dalam pembahasan fenomena historis. Oleh karena itu, ke depan usaha perlu diarahkan untuk menempatkan ideologi dan kepentingan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai jiwa dari narasi buku teks pelajaran sejarah. Dengan demikian, buku teks pelajaran sejarah Indonesia sungguh-sungguh berisi perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata kehidupan ideal yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, P., 2005. *Churchill: The Unexpected Hero*. Oxford: Oxford University Press.
- Aitken, I., 2013. *The Concise Routledge Encyclopedia of the Documentary Film*. Oxon: Routledge.
- Anderson, B., 1991. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Crawford, K., 2001. Constructing national memory: The 1940/41 Blitz in British history textbooks. *Internationale Schulbuchforschung* 23. Verlag Hahnsche Buchhandlung .ISSN 0172-8237.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Seminar Sejarah Nasional V: Sub Tema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- Derrida, J., 1997. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. London: The Johns Hopkins University Press.
- Foster, S., 2005. "The British Empire and Commonwealth in World War II: Selection and Omission in English History Textbooks". *International Journal of Historical Learning Teaching and Research* No. 5 pp. 1-19. ISSN 1472-9466.
- Glaserfeld, E. von., 1984. "Thoughts about Space, Time, and the Concept of Identity" dalam Pedretti A. (ed.) *Of of: A book conference*. Zürich: Princelet Editions.
- Ipsos Mori. (2006) *Young People and British Identity*. London: Ipsos Mori.
- Kartodirdjo, S., 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Levine, P., 2007. *The British Empire: Sunrise to Sunset*. Harlow: Pearson Education Limited.

- Mahmood, K., 2006. "The Process of Textbook Approval: A Critical Analysis" pada *Bulletin of Education & Research June 2006, Vol. 28, No. 1, pp. 1-22*.
- Niel, R. van., 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ponting, C., 1991. *1940: Myth and Reality*. London: Hamish Hamilton.
- Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Renan, E., 1882. "What is A Nation?" dalam Wolf, Stuart, ed..(1996). *Nationalism in Europe, 1815 to Present*. London: Routledge.
- Rosidi, S., 2007. *Analisis Wacana Kritis Sebagai Ragam Paradigma Kajian Wacana*. Makalah disajikan pada Sekolah Bahasa, atas prakarsa Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Bahasa, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 15 Desember 2007.
- Suryaman, M., 2007. Dimensi-Dimensi Kontekstual di Dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia. Paper diunduh dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/147>.
- Sutherland, H., 2008. "Meneliti sejarah penulisan sejarah" dalam Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, ed. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarunasena, 2009. *Sejarah SMA/MA*. Jilid 2. Jakarta: Depdiknas.
- Vessey, M., 2011. *The Calling of the Nations: Exegesis, Ethnography, and Empire in a Biblical-historic Present*. Toronto: University of Toronto Press.
- Wiriaatmadja, R., 1992. *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.

Internet

- BBC 19 September 2014 pada <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441>.
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/image?show=0&t=1286555314> diunduh pada 4 November 2015.